



## ANGGARAN

# APBD Induk Ditarget 9 November

SINGARAJA - Pembahasan APBD Induk 2016 nampaknya masih membutuhkan proses yang panjang. Gara-garanya, sampai saat ini dana-dana perimbangan dari pemerintah pusat, masih dalam angka yang masih sangat sementara. Akibatnya pembahasan APBD pun belum menunjukkan tanda-tanda akan disahkan dalam waktu dekat ini.

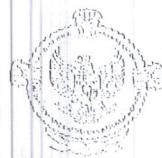
Meski telah menyampaikan pengantar nota keuangan untuk RAPBD 2016, sampai kini pemerintah kabupaten sendiri belum berani memastikan angka-angka yang tercantum dalam nota keuangan. Alasannya sampai saat ini dana perimbangan pun belum dipastikan oleh pemerintah pusat.

Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengakui jika angka-angka dalam nota keuangan sifatnya masih sangat-sangat sementara. Angka-angka itu dipasang berdasarkan pendekatan-pendekatan birokratis dan teknokratis. "Angka pastinya memang setelah APBN ketok palu," kata Puspaka.

Dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah kepada DPRD Buleleng, disebutkan dana perimbangan pada tahun 2016 dirancang sebesar Rp 980,04 miliar. Turun 1,38 persen dibandingkan anggaran tahun 2015 yang sebesar Rp 993,7 miliar. Angka itu terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 36,6 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp 868,5 miliar, serta dana alokasi khusus sebesar Rp 88,5 miliar.

"Rencananya APBN *kan* ketok palu tanggal 30 Oktober ini. Mudah-mudahan tepat waktu, sehingga kami bisa pastikan angka-angka dana perimbangan. Kalau sudah pasti dan lancar, tanggal 9 November targetnya sudah ketok palu," imbuh Puspaka.

Penetapan APBD 2016 pada bulan November, kata Puspaka, bukan tanpa alasan. Pemerintah berharap verifikasi dari Pemerintah Provinsi Bali sudah selesai pada pertengahan Desember 2015, sehingga tahapan-tahapan pengadaan yang melalui proses tender, bisa dilakukan pada bulan Desember. Selanjutnya pada bulan Januari 2016, sudah bisa dilakukan tahapan-tahapan pembangunan. (eps/gup)



EKA PRASETYA/RADAR BALI

INVENTARIS: Satpol PP memasang papan asset daerah.

## Rawan Diserobot, Pasang Papan

SINGARAJA – Gara-gara rawan diserobot, sejumlah aset milik pemerintah daerah kini mulai dipasangi papan tanda kepemilikan aset. Rata-rata lahan yang kini dipasangi tanda tersebut, adalah lahan-lahan pemerintah yang berada jauh dari pusat pemerintahan, dan berbentuk lahan kebun.

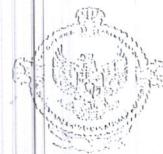
Tercatat sebanyak 163 bidang tanah dari total 694 bidang tanah milik pemerintah daerah yang dipasangi tanda-tanda tersebut. Pemerintah menganggap lahan-lahan perkebunan, rentan dengan aksi penyerobotan, meski kini telah persertifikat.

Beberapa lahan itu berada di wilayah Desa Gesing, Kecamatan Banjar. Lahan perkebunan disana saat ini menjadi perkebunan kelapa dan cengklik. Lahan itu dikelola Perusahaan Daerah Swatantra.

“Kami mengantisipasi saja. Bisa jadi nanti ada yang mengakui, padahal ini tercatat di kartu inventaris barang kami, dan sertifikatnya kami sudah pegang,” kata Kepala Sub Bidang Pengamanan Aset Daerah, Pasda Gunawan, Kamis (29/10) siang kemarin.

Menurut Pasda saat ini ada banyak lahan-lahan pemerintah yang ada di pedesaan. Lahan itu bisa saja diduduki oleh orang lain, karena dianggap lahan tak bertuan. Dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Mengingat luas lahan milik pemerintah cukup banyak.

Untuk saat ini pemerintah memfokuskan pemasangan papan itu, pada aset-aset berupa lahan perkebunan. “Kalau yang diatasnya sudah berdiri fasum seperti puskemas atau sekolah, untuk sementara tidak kami pasang dulu. Kedepan semua yang tercatat, akan kami pasangi papan seperti itu,” tandasnya. (eps/gup)



## ForBALI Kecam Pembatalan Diskusi Reklamasi

DENPASAR-Pembatalan sesi diskusi pada program utama Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) mendapat kecaman dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI). Terlebih dengan alasan pembatalan yang disebabkan adanya dugaan tekanan dari pihak kepolisian, sejumlah aktivis ForBALI seperti Wayan "Gendo" Suardana ■

► Baca ForBALI... Hal 31



ISTIMEWA

MEREMBET : Warga penolak reklamasi di Sukawati, Gianyar, berpose di depan baliho. Pelarangan merembet ke acara diskusi di UWRF.

## Ada Upaya Persempit Wacana Penolakan

### ■ FORBALI...

Sambungan dari hal 21

Jerinx Superman Is Dead (SID) yang sebelumnya diundang panitia sebagai pembicara dalam panel tentang gerakan lingkungan yang makin meluas, juga menyatakan penyesalannya.

Ini ditegaskan Koordinator ForBALI, Wayan "Gendo" Suardana, kemarin (29/10). Atas pembatalan itu, dia sangat menyalahkan UWRF yang menyerah begitu saja atas upaya-upaya pembatalan. Sebagai sebuah festival berkaliber internasional, semestinya semestinya kata dia, pihak UWRF tidak segampang

itu ditekan oleh pengusaha. "Bukanlah persiapan mereka sudah matang, konsep acara sudah diperhitungkan dengan teliti. Baik kesesuaian dengan visi festival maupun manfaat dan risiko yang akan dihadapi?" tanyanya. Lebih lanjut, kata Gendo, pembatalan sesi diskusi Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa, itu dari hasil konfirmasi kepada pihak panitia, menurut versi panitia yakni terpaksa membatalkan karena permintaan banyak pihak seperti kepolisian yang menganggap diskusi ini tak sesuai tujuan festival. Yakni, sebagai even budaya dan pariwisata. "When it's environment

vs. big business, tempers and passion tend to run high. The planned reclamation of 700ha of water and mangroves for large-scale development has birthed one of the biggest environmental movements in Indonesia's history: Bali Tolak Reklamasi. This session has been cancelled," sebutnya, mengutip website dari panitia kegiatan UWRF.

"Kalo ForBALI sih biasa saja, karena hal begini sudah kenyal yang kami alami," tegasnya. Selain itu, kata Gendo, atas pembatalan itu, ForBALI menurutnya menyadari sepenuhnya jika reklamasi Teluk Benoa adalah agenda rakus dari pengusaha

yang di-backup pengusaha.

"Tentu saja mereka tidak akan membiarkan dengan gampang ada agenda-agenda penolakan reklamasi. Apalagi dalam level internasional seperti UWRF. Hal ini menunjukkan betapa kekuasaan menggunakan power-nya dengan berbagai alasan untuk menutup dan mempersempit setiap wacana-wacana penolakan reklamasi Teluk Benoa," paparnya.

Termasuk, dia juga menyebut pembatalan sesi gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa ini sebagai perpaduan sempurna untuk membungkam kebebasan berspesies di Bali. (pra/ara/pit)